

**Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Ditinjau Dari Komunikasi Pembangunan (Studi Pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Air Minum Provinsi Riau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)**

**Andi Kardian Riva'i<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Komunikasi (STISIP Persada Bunda)  
[andiriva39i@gmail.com](mailto:andiriva39i@gmail.com)

**ABSTRACT**

*It takes a driving force capable of mobilizing and directing the community's ability to realize the ideals of development, in this case the government as a communicator or source policy. The government intended in this research is the Riau Province Water Supply System Development Work Unit, Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and People's Housing as the party responsible for the implementation of Community-Based Drinking Water and Sanitation Program (Pamsimas). The flow of this research starts from the universal elements of communication ie S (Source), M (Messages), C (Channel), R (Receiver), E (Effect) which involves communication planning and organizational communication in addressing development issues. This research uses descriptive qualitative method with purposive sampling technique. Informant research as many as 5 people consisting of 1 person Head of Unit Development of Water Supply System, 1 staff chairman and 3 members of Pamsimas management. The results of this study indicate the improvement of communication quality characterized by information, motivation and education activities for the implementation of Pamsimas program which each stage experienced improvement and growth of the number of participants, mainly addressed to the villagers or poor with the provision of water and sanitation at low cost.*

**Key word: Pamsimas, Communication development**

**ABSTRAK**

Dibutuhkan adanya unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, dalam hal ini pemerintah sebagai komunikator atau sumber (*source*) kebijakan. Pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Bebas Masyarakat (Pamsimas). Alur dalam penelitian ini dimulai dari unsur-unsur universal dari komunikasi yaitu *S (Source)*, *M (Messages)*, *C (Channel)*, *R (Receiver)*, *E (Effect)* yang melibatkan perencanaan komunikasi dan komunikasi organisasi dalam menjawab persoalan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Satuan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 1 orang ketua staff dan 3 orang anggota pengelola Pamsimas. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan kualitas komunikasi ditandai dengan aktivitas informasi, motivasi dan edukasi bagi pelaksanaan program Pamsimas yang tiap tahapannya mengalami perbaikan dan pertumbuhan jumlah peserta, terutama ditujukan kepada penduduk desa atau miskin dengan penyediaan air dan sanitasi dengan biaya murah.

**Kata kunci: Pamsimas, Komunikasi Pembangunan**

## A. PENDAHULUAN

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan dengan pendekatan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: PR 01.03-DC/259, Perihal: Pemberitahuan Penjaringan Minat Program Pamsimas III TA 2016-2019, secara nasional program ini telah dimulai sejak tahun 2008, dan hingga kini Pamsimas telah berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu: Pamsimas I, tahun 2008-2012 yang diikuti sebanyak 110 Kabupaten; Pamsimas II, tahun 2013-2015 dengan peserta yang diakumulasikan dengan Pamsimas I sebanyak 220 Kabupaten atau lebih dari 10.000 Desa; dan Pamsimas III, tahun 2016-2019 target Desa sasaran sebanyak 15.000 Desa.

Ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah dalam beberapa tahun belakangan disektor air meningkat, perhatian tersebut berkenaan dengan kegiatan yang ditujukan kepada penduduk desa atau golongan miskin dengan penyediaan air dan teknologi sanitasi dengan biaya murah. Pamsimas yang dikelola oleh lintas kementerian yaitu Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan haruslah benar-benar menjadi media perantara dan saluran komunikasi yang baik antar lembaga pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menetapkan keputusan yang kolektif, walaupun membutuhkan waktu yang panjang-namun hal tersebut merupakan tantangan dalam mewujudkan perencanaan yang partisipatif.

Secara umum dapat digambarkan ada 3 (tiga) pelaku dalam program Pamsimas, pertama pelaku Pusat adalah yang terlibat dalam program Pamsimas untuk tingkat nasional, yaitu: Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan; kedua pelaku Provinsi adalah yang terlibat dalam program Pamsimas untuk tingkat Provinsi, yaitu: Bappeda Provinsi, Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi; dan yang ketiga, pelaku Kabupaten adalah yang terlibat dalam program Pamsimas untuk tingkat Kabupaten, yaitu: Bappeda Kabupaten, Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kabupaten, dan Desa sasaran.

Untuk program Pamsimas III, di Provinsi Riau ada 10 (sepuluh) Kabupaten yang menjadi peserta, yaitu: Kabupaten Bengkalis; Kabupaten Indragiri Hilir; Kabupaten Indragiri Hulu; Kabupaten Kampar; Kabupaten Kepulauan Meranti; Kabupaten Kuantan Singingi; Kabupaten Pelalawan; Kabupaten Rokan Hilir; Kabupaten Rokan Hulu; dan Kabupaten Siak.

Selanjutnya, seperti yang dikutip dalam halaman resmi Pamsimas (<http://www.pamsimas.org/> diakses 15/03/2016) program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga dipedesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai-nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target air minum dan sanitasi melalui pengarus-utamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Dari penjelasan program diatas, program Pamsimas bukan tidak mengalami hambatan dan masalah, secara prosedur dikatakan Pamsimas adalah program yang dilaksanakan bersama-sama berdasarkan pendekatan berbasis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian dan lembaga, namun persoalan koordinasi antar sektor masih terlihat aktivitas program tersebut dilakukan sendiri-sendiri dan tumpang tindih, selanjutnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Pamsimas yang dilakukan tidak sekedar memenuhi mekanisme, tetapi dijadikan momentum untuk lebih memahami tujuan dan sasaran dari program Pamsimas, serta mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi lintas

sektor guna keterpaduan dan sinergitas dalam melaksanakan satu bentuk program pembangunan sehingga memberi hasil sebagaimana yang diharapkan.

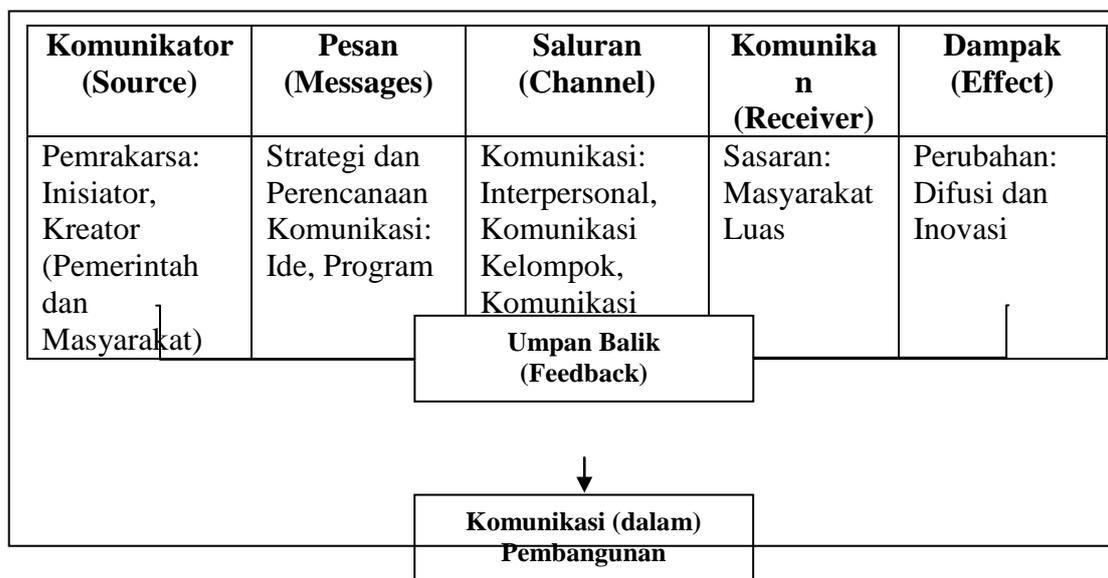
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan kendala komunikasi lintas program dan lintas sektoral yang dilakukan dalam pelaksanaan program Pamsimas. 2). Menganalisa unsur-unsur komunikasi dalam komunikasi lintas sektoral program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di tinjau dari komunikasi pembangunan. Manfaat penelitian ini adalah: 1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran tentang suatu konsep pengembangan model komunikasi pembangunan dalam program Pamsimas. 2). Penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif pemecahan persoalan partisipasi dalam penyediaan prasarana yang sangat penting bagi pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan; di mana persoalan tersebut sangat terkait dengan proses komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

## B. TINJAUAN TEORITIS

### 1. Komponen Komunikasi

Harol D. Lasswell (Littlejohn, 1996:334) dalam sebuah artikel klasik yang ditulisnya pada tahun 1948 yang berjudul *The Structure and Function of Communication in Society* menjelaskan bahwa, untuk mantapnya strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan, yaitu *who says what, to whom, to which channel and with what effect*. Rumus di atas tampaknya sederhana tetapi jika dikaji lebih jauh, secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama, yaitu: siapa (*who*), bicara apa (*says what*), pada saluran mana (*in which channel*), kepada siapa (*to whom*), dengan pengaruh apa (*with what effect*).

Menurut Riva'i (2016:11), untuk memberikan pemahaman dikemukakan lima unsur-unsur dasar dari komunikasi sosial pembangunan:



Gambar. 1  
Unsur-unsur Komunikasi Sosial Pembangunan (Riva'i, 2016:11)

### 2. Komunikasi Pembangunan

Menurut Gonzales (Amri, 1988; Wardhani, 2002:263) teori komunikasi dalam teori pembangunan mempunyai hubungan yang erat dalam prakteknya, aliran informasi di setiap negara diatur oleh ideologi pembangunan negara itu. Hal ini menunjukkan bahwa cara berkomunikasi yang digunakan dalam suatu sistem sosial ialah fungsi struktur sosial dan kepercayaan yang ada dalam sistem tersebut. Menurut Nasution (2012:1) sejak penghujung 60-an dikalangan ilmu komunikasi telah berkembang suatu spesialisasi mengenai penerapan teori dan konsep komunikasi secara khusus untuk keperluan pelaksanaan program-program pembangunan. Pengkhususan itu kemudian dikenal dengan sebutan “komunikasi pembangunan”.

Program Pamsimas ini juga menjadi bagian yang penting untuk diteliti melalui konsep komunikasi pembangunan. Permasalahan air juga tidak luput dari perhatian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Nasution (2012) dalam bukunya “Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya” bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini di sektor air dan sampah (*water and wastes*) terjadi peningkatan perhatian terhadap apa yang dapat disumbangkan oleh aktivitas informasi, motivasi dan edukasi bagi implementasi proyek yang sukses dan penggunaan serta pemeliharaan selanjutnya dari pelayanan yang disediakan. Perhatian itu terutama berkenaan dengan proyek-proyek yang ditujukan kepada penduduk desa atau golongan miskin dikota dengan penyediaan air dan teknologi sanitasi dengan biaya murah.

### **3. Pemerintah sebagai Sumber (Source)**

Komunikator penelitian ini adalah pemerintah sebagai sumber. Dalam penelitian ini, program Pamsimas yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan. Kegiatan adalah bentuk aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh instansi terkait, yaitu:

#### **a. Direktorat Jenderal Cipta Karya**

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi (<http://pu.go.id/organisasi/ditjen-cipta-karya>):

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- 6) Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal cipta karya; dan

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

b. Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Satuan kerja adalah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah.

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam Bab I Ketentuan Umum Bagian Kesatu Pasal 1, Poin 7 adalah Penyelenggaraan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.

#### **4. Strategi Komunikasi dalam Pembangunan**

Meneliti tentang strategi tidak bisa dilakukan secara parsial tanpa mengkaji kebijakan dan perencanaan komunikasi. Menurut Ely D. Gomez (1993) dalam Cangara (2013:62-63), membicarakan perencanaan komunikasi tidak mungkin dilakukan tanpa mengaitkan dengan kebijakan komunikasi, sebab kebijakan komunikasi merupakan perencanaan strategis jangka panjang yang harus dijabarkan dalam perencanaan operasional, sedangkan strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi.

Menurut *Global Water Patnership (GWP)* atau Kemitraan Air Global dalam Koudstaal dan Paranjpye (2012:128) tata kelola mengacu kepada pengaturan kelembagaan, sekaligus mengacu kepada kebijakan dan tindakan serta bagaimana hal tersebut merangkul hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya. Pengelolaan air dapat didefinisikan sebagai tugas dalam produksi barang dan jasa terkait air demi manfaat yang dapat diraih oleh masyarakat secara keseluruhan, pada hari ini dan masa yang akan datang.

#### **5. Saluran Komunikasi dalam Pembangunan**

Saluran komunikasi dalam pembangunan peneliti hubungkan dengan konsep teoritis komunikasi pembangunan. Menurut Nasution (2012:105) kesukaran untuk menyusun pengertian komunikasi pembangunan secara definitif, sama peliknya dengan merumuskan secara persis “apa yang dimaksudkan dengan pembangunan” itu sendiri. Kesulitan itu muncul terutama disebabkan luasnya makna yang tercakup dalam pengertian-pengertian mengenai kedua hal tersebut. Komunikasi mempunyai arti yang begitu luas. Pada saat yang sama, dengan mudah dapat dilihat dan dapat dirasakan betapa kompleks dan menyeluruh rentang cakupan masalah pembangunan itu sendiri.

Menurut Nasution (2012:106) dalam pengertian yang luas tadi, dapat digolongkan berbagai teori dan pendekatan yang berasal dari dari bermacam-macam disiplin ilmu yang mengupas masalah inter-relasi komunikasi dengan pembangunan. Bahasan yang menonjol mengenai hal itu, telah dikemukakan, antara lain oleh Schramm (1964), Lerner (1974), Pye (1963), Rogers (1969), Deutsch (1963), Pool (1963), Tehranian (1979), dan Dissayanake (1982). Pandangan-pandangan yang mereka ajukan pada dasarnya telah meletakkan dasar bagi suatu pendekatan yang bersifat global dan makro, tentang berbagai kegiatan besar yang bernama pembangunan, juga dalam arti yang menyeluruh. Beberapa studi dan pendekatan yang telah disebutkan diatas, yang diterangkan berikut ini:

a. Studi Lerner. Cikal bakal lahirnya komunikasi sosial pembangunan antara lain dipengaruhi oleh karya Daniel Lerner (1917-1980) yang dituangkan dalam bukunya yang klasik berjudul *The Passing of Traditional Society: Modernizing The Middle East, 1958*. Buku tersebut membahas tentang peranan keberaksaraan atau kemampuan

- baca tulis (*literacy*) dan ketertadahan media massa dalam proses modernisasi individu di enam negara timur tengah (Nasution, 2012:107-108)
- b. Studi McClelland, melakukan studi tentang dorongan psikologis yang memotivasi suatu masyarakat untuk mencapai kemajuan. Dalam studinya yang berjudul *The Achieving Society (1961)* ia berkesimpulan bahwa untuk memajukan masyarakat harus dimulai dengan mengubah sikap (*attitude*) para anggotanya. Kebutuhan untuk mencapai sesuatu (*need for achievement* atau n/Ach) merupakan dorongan pada seseorang individu untuk menghadapi tantangan, mengatasi oposisi, dan berhasil menanggulangi berbagai kesulitan. Masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi yang mencapai sesuatu (*achieving personalities*) akan menjadi suatu masyarakat yang juga mencapai sesuatu dan karena itu akan berkembang dan maju (Nasution, 2012:112)
  - c. Studi Wilbur Schramm, melalui studinya yang ditugaskan oleh UNESCO mengkaji peranan komunikasi dalam pembangunan nasional. Dalam laporannya yang berjudul *Mass Media and National Development: The Role of Information in Developing Countries (1964)*. Schramm mengemukakan bahwa media massa dapat berperan dalam beberapa hal, yang paling pokok adalah dapat menyebarluaskan informasi tentang pembangunan, dapat mengajarkan melek huruf serta keterampilan lainnya yang memang dibutuhkan untuk membangun masyarakat dan dapat menjadi penyalur suara masyarakat agar mereka turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan dinegaranya (Nasution, 2012:116).
  - d. Studi Inkeles dan Smith, juga mengkaji tentang pentingnya faktor manusia sebagai faktor penting dalam penopang pembangunan. Aspek manusia penting sekali sebagai pelaksana teknologi atau pelaku utama proses pembangunan yang berlangsung. Maka Inkeles dan Smith kemudian memberikan ciri-ciri manusia modern, antara lain: keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam. Berdasarkan kajiannya, Smith-Inkeles menemukan bahwa pendidikan adalah lembaga paling efektif untuk mengubah manusia (Nasution, 2012:120-122)

## **6. Komunikan dalam Pembangunan (Partisipasi Masyarakat)**

Sasaran atau komunikan dalam pembangunan ini adalah masyarakat. Secara konseptual, komunikasi dan pembangunan bersumber dari teori komunikasi dan teori pembangunan. Sumber-sumber yang ada pada keduanya menekankan pada prinsip partisipasi. Kontak sosial dan komunikasi merupakan bagian dari unsur yang digunakan untuk menghubungkan orang-orang yang terlibat didalam pembangunan. Sehubungan dengan hal diatas, untuk mewujudkan program-program yang dicanangkan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses dalam pembuatan keputusan melalui dialog, pengembangan wawasan berpikir dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Jnabrota Battacharyya mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Mubyarto mendefenisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010:46).

Pengertian partisipasi yang dijelaskan oleh Britha Mikkelsen yang mengutip pengertian FAO (Mikkelsen, 2001:4) adalah: partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan kebijakan; partisipasi

adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang di tentukan sendiri; partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka; partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa organisasi atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; partisipasi adalah pemantapan dialog antar masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.

## **7. Efek dalam Pembangunan (Difusi dan Inovasi)**

Everett M. Rogers (1995) mendefinisikan difusi sebagai (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*), proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.

Masyarakat yang menghadapi suatu penyebar serapan inovasi, oleh Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Nasution (2012:126) dikelompokkan dalam golongan-golongan, pertama, *Inovator* yakni mereka yang memang sudah pada dasarnya menyenangi hal-hal yang baru, dan rajin melakukan percobaan-percobaan; kedua, *Penerima Dini (Early Adopters)* yaitu orang-orang yang berpengaruh, tempat teman-teman sekelilingnya memperoleh informasi, dan merupakan orang-orang yang lebih maju dibandingkan orang sekitarnya; ketiga, *Mayoritas Dini (Early Majority)* yaitu orang-orang menerima suatu inovasi selangkah lebih dahulu dari rata-rata kebanyakan orang lainnya; keempat, *Mayoritas Belakangan (Late Majority)* yakni orang-orang yang baru bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang sekelilingnya sudah menerima; dan kelima, *Langgards*, yaitu lapisan yang paling akhir dalam menerima suatu inovasi.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena mempunyai tiga alasan yaitu: pertama, mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda; kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian; ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. Sedangkan menggunakan pendekatan deskriptif, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat (Arikunto, 2002:309). Penelitian ini menggunakan menggunakan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari, yaitu: 1 Orang Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 1 Orang Ketua Staff Pengelola Pamsimas; 3 Orang Anggota Staff Pengelola Pamsimas.

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan untuk mencapai tujuan penelitian. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data, pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut: wawancara, observasi, dokumentasi, tinjauan literatur. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik

Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2005:330). Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang: a). Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama; b). Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda; c). Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari, yaitu: 1 Orang Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 1 Orang Ketua Staff Pengelola Pamsimas 2015; 3 Orang Anggota Staff Pengelola Pamsimas 2015.

Tabel. 1  
Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan
1.	Ir. Irwan Sipahutar, M. Eng	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	54	S2
2.	Hendra, ST	Ketua Staff Pengelola Pamsimas	38	S1
3.	Drs. Muhaimin	Staff Pengelola Pamsimas	50	S1
4.	Mulyani, Amd	Staff Pengelola Pamsimas	30	D III
5.	Kristono Wibisono, Amd	Staff Pengelola Pamsimas	35	D III

#### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinjauan Komunikasi Pembangunan dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 2015, pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Riau.

##### 1. Pemerintah sebagai Komunikator Pembangunan

Pemerintah adalah penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituntut harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling terkait termasuk tugas pembangunan yang multidimensional. Oleh karena itu, suksesnya program pembangunan disuatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya, termasuk juga dalam program Pamsimas 2015 ini.

*“Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Executing Agency (EA) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program secara menyeluruh. Sementara Implementing Agency (IA) adalah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dalam Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. IA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yang menjadi tanggung jawabnya”. (Wawancara, Ir. Irwan Sipahutar, M. Eng 05/09/2016)*

*“Menurut hemat kami yang tentunya berkedudukan di Satker SPAMS Riau yang banyak menerima pelaporan dari berbagai kabupaten/ kota, dasar utama adalah amanat Undang-Undang No. Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa adalah penanggung jawab utama pembangunan desa, segala upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat desa, jadi meskipun program Pamsimas menempatkan masyarakat pelaku utama dan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan, namun pelaksanaan, pengelolaan dan juga kesinambungannya tentu tidak dapat berdiri sendiri. Fasilitator sebagai pendamping harus mampu membangun relasi yang baik, komitmen dengan pemerintah desa dalam berbagai bentuk kegiatan dan tahapan-tahapan program Pamsimas ini” (Wawancara, **Hendra**, ST 12/09/2016)*

## **2. Strategi Komunikasi dalam Pembangunan**

Komunikasi dalam pembangunan merupakan usaha pemilihan strategi dan model komunikasi yang menjelaskan tujuan, mengkaji dan menjelaskan tentang suatu isu, ide atau gagasan aktual yang berkaitan dengan perubahan, menuju pembangunan masyarakat.

*“Pada prinsipnya, pelaksanaan program Pamsimas 2015 terbuka untuk kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi DKI Jakarta. Penentuan kabupaten didasarkan adanya surat Bupati tentang pernyataan minat untuk mengikuti Program Pamsimas yang memuat pernyataan minat dan kesanggupan Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti Program Pamsimas II yang meliputi: kesanggupan untuk menyediakan dana APBD kabupaten/kota untuk membiayai; dan kesediaan mengikuti pedoman dan petunjuk teknis Pamsimas II yang berlaku”. (Wawancara, **Ir. Irwan Sipahutar**, M. Eng 05/09/2016)*

*“Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target millenium Development Goals (MDGs) sektor air minum dan sanitasi. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebagai salah satu program untuk meningkatkan akses dan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat pedesaan. Khusus di Riau untuk Tahun 2015 ada 67 dari 10 Kabupaten/Kota yang mengikuti program ini. Strategi program Pamsimas yang tentunya melibatkan masyarakat melalui proses pemberdayaan untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif dan partisipasi aktif dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoprasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan dimasyarakat termasuk dilingkungan sekolah (Wawancara, **Ir. Irwan Sipahutar**, M. Eng 05/09/2016).*

Program Pamsimas 2015 adalah salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah), dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Lokasi sasaran program Pamsimas, khusus di Provinsi Riau untuk Tahun 2015 ada 67 Desa dari 10 Kabupaten/Kota yang mengikuti program ini. ini menandakan bahwa keseriusan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan yaitu, a). Air Bersih, dan b). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Secara umum bantuan teknis dan pendanaan yang diberikan kepada kepada desa melalui proses dan memiliki tahapan-tahapan sesuai dengan jenis kewenangan yang diberikan kepada masing-masing penanggung jawab program, ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

“Penyaluran bantuan teknis dan pendanaan tersebut, di tingkat masyarakat dilakukan melalui 5 (lima) komponen program yaitu: (Wawancara **Hendra, ST, Kristono Wibisono, Amd** 12/09/2016):

No	Komponen	Penanggung Jawab
1.	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Daerah</i>	Penanggungjawab tingkat Pusat: Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen PMD. Penanggungjawab tingkat Daerah: Bappeda dan BPMD/Bapermas.
2.	<i>Peningkatan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi</i>	Penanggungjawab tingkat Pusat : Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan Penanggungjawab tingkat daerah: Dinas Kesehatan
3.	<i>Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi</i>	Penanggungjawab tingkat Pusat : Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan. Penanggungjawab tingkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum (atau dengan nama lain).
4.	<i>Insentif Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota</i>	Penanggungjawab tingkat Pusat : Ditjen Cipta Karya, Pelaksanaan Program: Penanggungjawab tingkat Pusat : Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.Kementerian PU.
5.	<i>Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program</i>	Penanggungjawab tingkat Pusat : Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Dari wawancara diatas, didapati 5 (lima) komponen program Pamsimas 2015 diatas bertujuan untuk mengotimalkan organisasi dalam merencanakan, mengelola dan menjaga keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang berkualitas disetiap unit-unit dan kelompok kerja.

Menurut wawancara yang telah dilakukan, bahwa program Pamsimas 2015 dalam penetapannya sudah masuk kedalam penetapan rencana pembangunan nasional maupun daerah, ini dapat diketahui dari wawancara berikut ini:

*Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada kami di Satker SPAM Riau, kesemua Kabupaten/Kota yang mengikuti program Pamsimas 2015, penyediaan air bersih menjadi prioritas khusus dalam RPJMD lima tahun mendatang. Maka untuk program ini diselaraskan dengan RPJM Provinsi Riau dan RPJM Nasional. Begitu juga dengan dinamika musrenbang. Sehingga upaya penyediaan air bersih bisa dilakukan secara maksimal. Apalagi hingga kini permasalahan air bersih belum kunjung tuntas. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih. Sehingga bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat. Wawancara, **Hendra ST, 12/09/2016**)*

Sebagai strategi program yang mawadahi dan mengkolaborasikan program-program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai akses 100% di desa, seperti kutipan wawancara berikut ini:

*“Pendanaan program Pamsimas melalui sumber dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia, rupiah murni dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta dana kontribusi swadaya masyarakat dan sumber dana lain yang*

*tidak mengikat. Selanjutnya bahwa sharing program APBN dan APBD dimana dana APBN membiayai BLM untuk 80% dari kebutuhan pendanaan desa sasaran, dan APBD wajib membiayai BLM minimal 20% kebutuhan pendanaan desa sasaran". (Wawancara, Drs. Muhaimin, 13/09/2016)*

Berdasarkan wawancara diatas, pendanaan program terstruktur mulai dari anggaran Pusat; Daerah; Desa: APBN, APBD Provinsi/Kabupaten; kontribusi masyarakat, anggaran lembaga non pemerintah; dana CSR dan sebagainya.

Diakui ada beberapa daerah yang telah melaksanakan program pengelolaan air bersih dan sanitasi, tentu ini adalah inisiatif yang muncul baik ditingkat Desa itu sendiri ataupun inisiatif Kabupaten yang mengarah kepada integrasi pembangunan air bersih di Desa, seperti yang telah dijelaskan berikut ini:

*"Kami kira ada beberapa desa yang telah melaksanakan peningkatan air bersih didaerah seperti penggunaan PAM yang dikelola oleh daerah, jika telah mandiri tentunya tidak kami sentuh dengan program ini lagi, namun jika belum tentunya kita dorong agar memasukan pengembangan dan keberlanjutan air minum dan sanitasi dalam perencanaan desa dan mengalokasikan dana APBD" (Wawancara, Drs. Muhaimin, 13/09/2016)*

Program pamsimas ini khusus ditujukan kepada desa-desa yang akses sanitasi dan air bersih yang belum tersentuh oleh program sejenis, dan tentunya desa-desa yang berminat mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan pembangunan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi.

### **3. Saluran Komunikasi dalam Pembangunan**

Segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian pesan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat memahami, menerima dan ikut melaksanakan gagasan tersebut.

*"Tentu pola komunikasi yang dibangun pada program ini dilakukan berjenjang berdasarkan uraian tugas personil, dimulai dari Koordinator Provinsi ke Koordinator Kabupaten Kota, dari Koordinator Kabupaten/Kota ke fasilitator-fasilitator tingkat Kecamatan maupun Desa sebagai ujung tombak dalam penyampaian-penyampaian pesan, strategi melalui upaya sosialisasi buku-buku petunjuk, teknis dan data, serta informasi-informasi dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan program ini" (Wawancara, Hendra ST, 12/09/2016).*

*"Pertama, teknis pelaksanaan dalam program ini melalui kegiatan yang kita sebut Petunjuk Pencetakan dan Penggunaan Poster dan Spanduk (P3S) yang disusun sesuai dengan konsep dasar media komunikasi sehingga terdapat keseragaman. Kedua, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yaitu pesan iklan melalui radio, misalnya disampaikan dalam bentuk komedi yang segar. Cara komedi yang diambil agar informasi dan pesan tidak terkesan menggurui, serta mudah diterima"(Wawancara, Hendra ST, 12/09/2016).*

Proses komunikasi atau model sosialisasi efektif yang digunakan adalah P3S sebagai media sosialisasi. Dengan demikian model sosialisasi ini menjadi sebagai suatu proses dimana pesan-pesan Pamsimas 2015 disampaikan dari sumber kepada penerima atau dengan kata lain komunikasi adalah penyampaian pesan-pesan dari sumber dengan harapan akan merubah prilaku atau tingkah-laku penerima.

Menciptakan kondisi yang demikian melibatkan perumusan strategi dan pengkoordinasian kelompok, serta implementasi terhadap pendekatan tersebut pada tingkat sub dalam program Pamsimas 2015.

*“Menurut laporan yang kami terima ada beberapa permasalahan yang dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan program Pamsimas ini.*

- a. Lemahnya koordinasi, koordinasi antar instansi yang terlibat dalam program Pamsimas masih menjadi kendala karena ada sebagian besar Kabupaten/Kota yang kurang memahami tupoksi masing-masing.*
- b. Kurangnya promosi kesehatan, kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi melalui stiker stop buang air besar sembarangan misalnya, mencuci tangan pakai sabun ataupun melalui media komunikasi kepada anak-anak sekolah melalui lagu-lagu yang bertemakan kesehatan dan kebersihan.*
- c. Permasalahan dalam pelaporan keuangan dalam program pamsimas ini, dikarenakan masih banyaknya fasilitator ditingkat kecamatan dan desa belum memahami cara pengisian-pengisian pelaporan yang terkait dengan program pamsimas ini (Wawancara, **Ir. Irwan Sipahutar, M. Eng** 05/09/2016)*

Komitmen dalam hal koordinasi, sosialisasi kegiatan dan kontribusi pendanaan terhadap kegiatan belum menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Perlu penyadaran bahwa kegiatan ini bukanlah hanya program rutin yang dilaksanakan pemerintah namun program ini juga untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan masyarakat di pedesaan.

#### **4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Hak atas air minum dan sanitasi yang baik adalah prioritas mutlak, oleh karena itu kita memastikan bahwa hak-hak tersebut ada dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai mana kutipan wawancara berikut ini:

*“Kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Penerima manfaat dari program Pamsimas adalah warga desa/kelurahan yang belum mempunyai akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak terutama kelompok miskin, dan masyarakat terpinggirkan (indigenous people) atau disebut juga masyarakat adat rentan yang diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, disepakati dan ditetapkan bersama oleh masyarakat desa/kelurahan melalui proses musyawarah warga” (Wawancara, **Ir. Irwan Sipahutar, M. Eng** 05/09/2016).*

Ditingkat sasaran dalam proses komunikasi adalah masyarakat, untuk itu bentuk yang diharapkan dari masyarakat adalah partisipasi dan pemberdayaan. Kesemuanya itu tentu merupakan sebuah kesepakatan antara masyarakat desa dan masyarakat yang bersangkutan yang sanggup memenuhi persyaratan mengikuti program, seperti yang telah peneliti kutip dari wawancara berikut ini:

*“Secara umum kriteria desa sasaran Pamsimas adalah: Belum pernah mendapatkan program Pamsimas; Cakupan akses air minum aman masih rendah; Cakupan akses sanitasi aman masih rendah; Penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas; Biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien; Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk menyediakan kader pemberdayaan masyarakat bidang AMPL (kader AMPL) minimal 3*

orang; Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM (Rencana Kerja Masyarakat); Menghilangkan kebiasaan BABS (Buang Air Besar Sembarangan)”(Wawancara **Kristono Wibisono, Amd** 14/092016).

Kreteria yang didapat berasal penjaringan minat yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten mengusulkan beberapa desa sasaran yang dianggap membutuhkan akses layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak. Proses pemilihan desa tentunya melibatkan secara aktif pemerintah daerah dalam penilaian desa serta turut bertanggung jawab terhadap penetapan desa yang tepat sasaran. secara garis besar tahap pemilihan desa berdasarkan: tahap seleksi dan penilaian ditingkat Kabupaten/Kota; tahap verifikasi dan pemerinkkatan dilakukan ditingkat Provinsi; dan yang ketiga penetapan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara, apakah program yang berbasis masyarakat ini menciptakan kesempatan ataukah beban bagi masyarakat:

*“Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa program ini tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi dipedesaan, tentunya ini kesempatan yang baik saya kira karena ada 3 (tiga) aspek penting dalam program ini: Meningkatkan akses layanan, artinya menambah akses bagi masyarakat yang belum memiliki akses; Berkelanjutan, artinya tidak hanya sesaat dan berkesinambungan; Wilayah pedesaan artinya hanya diperuntukan untuk masyarakat desa yang menikmati program ini, memperoleh hak air dan sanitasi yang baik. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa ini kesempatan, yang memang pelaku utama dan penentu seluruh tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga tahap operasional dan pemeliharaan. Ini adalah gambaran bagaimana masyarakat saling berunding dan berdiskusi menyelesaikan masalah dan kemudian menjadi kearifan lokal yang harus ditempuh setiap pengambilan keputusan” (Wawancara, **Ir. Irwan Sipahutar, M. Eng** 05/09/2016).*

Partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas 2015 yang dilakukan berdasarkan kondisi internal dan eksternal kegiatan tersebut. Hasil program menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan pemikiran dalam bentuk usulan, saran dan kritik, tenaga dan sebagainya. seperti wawancara berikut ini:

*Ada dua model partisipasi, yang pertama Pengambilan Keputusan: Umumnya laki-laki sudah menikah yang berusia 25-50 tahun, kepala rumah tangga. Mereka adalah tipe yang berpikir rasional dan butuh diyakinkan. Bagi mereka, berbicara gagasan baru atau perubahan, harus disertai penjelasan rasional dan bukti yang mendukung keberhasilan gagasan tersebut. Kedua Agen Perubahan, yaitu orang-orang yang mempengaruhi para pengambil keputusan, yaitu:*

- a. Ibu Rumah Tangga, memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangga, termasuk yang berhubungan dengan kesehatan keluarga dan anak-anak*
- b. Pelajar, dengan pengetahuan yang mereka terima dari sekolah.*
- c. Pemuka Agama, sangat dihormati dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat.*
- d. Kelompok Kontraktor, memiliki akses dalam penyediaan air bersih dan toilet.*
- e. Praktisi (formal dan non formal), sebagai orang yang akan memberikan penyuluhantentang sanitasi yang baik. (Wawancara, **Drs. Muhaimin, 13/09/2016).***

## **5. Efek Pembangunan**

Efek jangka panjang dari program pamsimas ini tentu mengacu kepada perubahan perilaku, dengan program Pamsimas, tumbuh beragam inovasi di tengah masyarakat dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber air, praktik Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan sebagainya.

*Kami akui pada kenyataannya dilapangan, bahwa pelaksanaan program ini dalam hal pelibatan masyarakat belum sesuai dengan prinsip pendekatan Pamsimas, masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya seperti:*

- a. adanya keterbatasan waktu pelaksanaan serta keterbatasan anggaran untuk merubah Perilaku Hidup Sehat Berbasis Masyarakat (PHBS) pada masyarakat sasaran;*
- b. keterbatasan kondisi sumber air;*
- c. Kurang Koordinasi antara satuan pelaksana/BP-SPAMs dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dengan masyarakat;*
- d. Kondisi topografi, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan semua warga (Wawancara, Drs. Muhaimin, 08/09/2016)*

Jadi secara keseluruhan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program ini, namun selaku bagian dari satuan pelaksana, berupaya melakukan perbaikan-perbaikan itu (kearah yang lebih baik) pada program Pamsimas mendatang. Komitmen yang kuat dan mengikat dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), LSM/NGO harus masuk, pelibatan Perguruan Tinggi dan untuk masyarakat harus ada sosialisasi yang menyeluruh untuk mengubah pola pikir masyarakat.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pengamatan pada program Pamsimas di Satker SPAM Provinsi Riau, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan penelitian ini, menggunakan unsur-unsur universal dari komunikasi pembangunan yaitu: *S (Source)* adalah Pemerintah sebagai komunikator pembangunan; *M (Messages)* adalah pesan yang disampaikan melalui ide, strategi dan program pamsimas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Riau; *C (Channel)* adalah media atau saluran yang digunakan dalam program ini baik dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi, maupun pesan layanan masyarakat menggunakan media brosur, baliho, maupun menggunakan radio dan televisi; *R (Receiver)* adalah sasaran yang ditujukan kepada masyarakat yaitu berupa peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; *E (Effect)* adalah Dampak yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program Pamsimas yaitu mengubah sikap nilai dan perilaku hidup bersih dan sanitasi yang sehat.
2. Implementasi program Pamsimas dalam penelitian ini dilihat dari perspektif dalam komunikasi pembangunan, yaitu: berbasis masyarakat; kemitraan; partisipatif; transparansi; tanggap kebutuhan; *reward and development*; kesinambungan dan keberlanjutan; dapat di pertanggung jawabkan.
3. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam program Pamsimas 2015 adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang merupakan langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat seperti penyadaran akan pentingnya praktik hidup sehat dan penyediaan air dan sanitasi warga. selain itu awal mula Pamsimas dijalankan untuk membantu permasalahan sumber air di beberapa desa yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota.
4. Hasil Program Pamsimas ini memberikan dampak yang positif terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya dan dirasa telah berhasil. Tak hanya pengadaan sumber air bersih dan sanitasi serta perubahan hidup sehat, namun juga dari segi wawasan masyarakat menjadi lebih teredukasi akan pentingnya meningkatkan kualitas kesehatannya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta Jakarta 2002
- Cangara, Hafied., *Perencanaan Strategi Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Jahi, Amri., *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1988.
- Koudstaal, Rob, dan Paranjpye, Vijay., Terjemahan: Irma Nurhayati dan Rita Mustikasari., *Melibatkan Masyarakat: Sebuah panduan tentang Pendekatan Negosiasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Telapak, Bogor, 2012.
- Littlejohn, Stephen W., *Theories of Human Communication*. 8<sup>th</sup>, Thomson Wadsworth, Belmont-California 1996.
- Mikkelesen, B irtha., *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- Nasution, Zulkarimen., *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Riva'i, Kardian, A., *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Komunikasi dalam Pembangunan*, CV. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2016
- Wardhani, Cory, Andy., *Kontribusi Komunikasi pada Teori Pembangunan*, Jurnal Mediator Vol. 3, 2002
- Dokumen:  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 *Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*
- Sekretariat Pamsimas., *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Program Pamsimas di Tingkat Masyarakat*, P-2 Edisi 2015
- Internet:  
<http://www.pamsimas.org/> di akses 15/03/2016  
<http://pu.go.id/organisasi/ditjen-cipta-karya> diakses 16/03/2016